Bogor Calling Vol. 2

HAK ATAS KOTA

ZINE

Hak Atas Kota

Layout: @wesekuteran
Diterbitkan oleh Bogor Calling, 2025
ANTI-COPYRIGHT

Hak cipta bebas. Setiap mahluk dianjurkan dan disarankan untuk mengkopi, mencetak, menggandakan, menyebar isi serta materi-materi yang ada di dalamnya.

KOTA INI MILIK SIAPA?

oleh: Tenkczyanski

Kita harus mulai dengan satu pertanyaan telanjang: **Kota ini milik siapa?**

Jalanan, taman, trotoar, ruang-ruang publik yang katanya buat semua orang — Tapi buktinya apa? Coba keluar malam-malam. Di bawah gemerlap lampu kota yang katanya "hidup", yang kita lihat cuma bar-bar mahal, coffeeshop 24 jam, minimarket nyala terus kayak nggak kenal matahari. Semua ruang yang berputar uang — yang berputar keuntungan. Membikin hukum diam.

Sementara taman kota? dikunci. Lapangan-lapangan digembok. Trotoar direbut mobil. Jam malam makin kenceng. Polisi keliling, tentara ikut-ikutan, Raimas wara-wiri kayak kota ini lagi perang. Tapi perang sama siapa? Sama kita? Sama orang-orang yang cuma mau duduk di bangku taman? Sama bocah-bocah yang nongkrong sambil ngisep rokok dan alokohol murahan?

Apa itu kebetulan? Atau memang kota ini dibangun bukan buat kita?

Bogor ini nggak beda sama Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Semua kota dibentuk sama. Bukan karena kebetulan, tapi karena desain. Desain yang udah disusun rapi sama pemodal, pengembang, dan pemerintah yang pura-pura lupa kalau mereka mestinya kerja buat rakyat.

David Harvey, seorang geograf radikal yang barangkali udah bosan melihat kota-kota dijadikan mesin kapitalisme, bilang dalam teorinya The Right to the City, bahwa hak atas kota bukan cuma soal bisa tinggal di sini. Lebih dari itu, ini soal siapa yang punya kendali atas ruang kota, siapa yang bisa menentukan kota ini mau dibentuk kayak apa, buat siapa, dan kenapa.

Tapi lihat kenyataannya: yang bisa menentukan wajah kota ini cuma yang punya duit. Pengembang. Korporasi. Aparat. Kita? Disuruh minggir. Digusur. Diusir.

Dari proyek tol Bocimi, sampai hotel-hotel yang nyempil di mana-mana. Dari cluster yang terus muncul kayak jamur, sampai mall yang maksa masuk jantung kota. Semuanya bikin kita mundur pelan-pelan. Digusur dari ruang publik. Dipaksa minggir ke pinggir kota. Kampung dibabat, pasar tradisional dicekik. Semua harus rapi, bersih, steril. Tapi cuma steril buat kita — rakyat kecil. Buat mereka yang bawa duit? Kota ini karpet merah.

David Graeber juga pernah ngomong, kota bukan cuma soal gedung-gedung, tapi soal relasi kuasa yang ada di baliknya. Kalau kota ini ruangnya terus dikontrol sama aparat dan pemodal, hak atas kota itu jadi ilusi. Cuma jargon kosong di spanduk.

Ayo jujur aja: kota ini penuh ruang yang seharusnya jadi tempat kita kumpul, ngobrol, ngerencanain sesuatu, atau sekadar istirahat. Tapi coba deh cari taman kota yang buka 24 jam. Nggak ada. Lapangan? Dipolice line. Tapi bar? Klub malam? Coffeeshop yang harganya nggak masuk akal? Silakan buka terus. Selama ada transaksi, selama ada yang beli, semua dipersilakan. Semua dihitung pemajuan.

Apa artinya? Ruang kota itu cuma milik yang bisa bayar. Kita dipaksa beli hak kita sendiri.
Mau nongkrong? Bayar.
Mau aman? Bayar.
Mau punya tempat di kota ini? Bayar.
Sisanya, lo cuma numpang hidup — Sebab di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak.

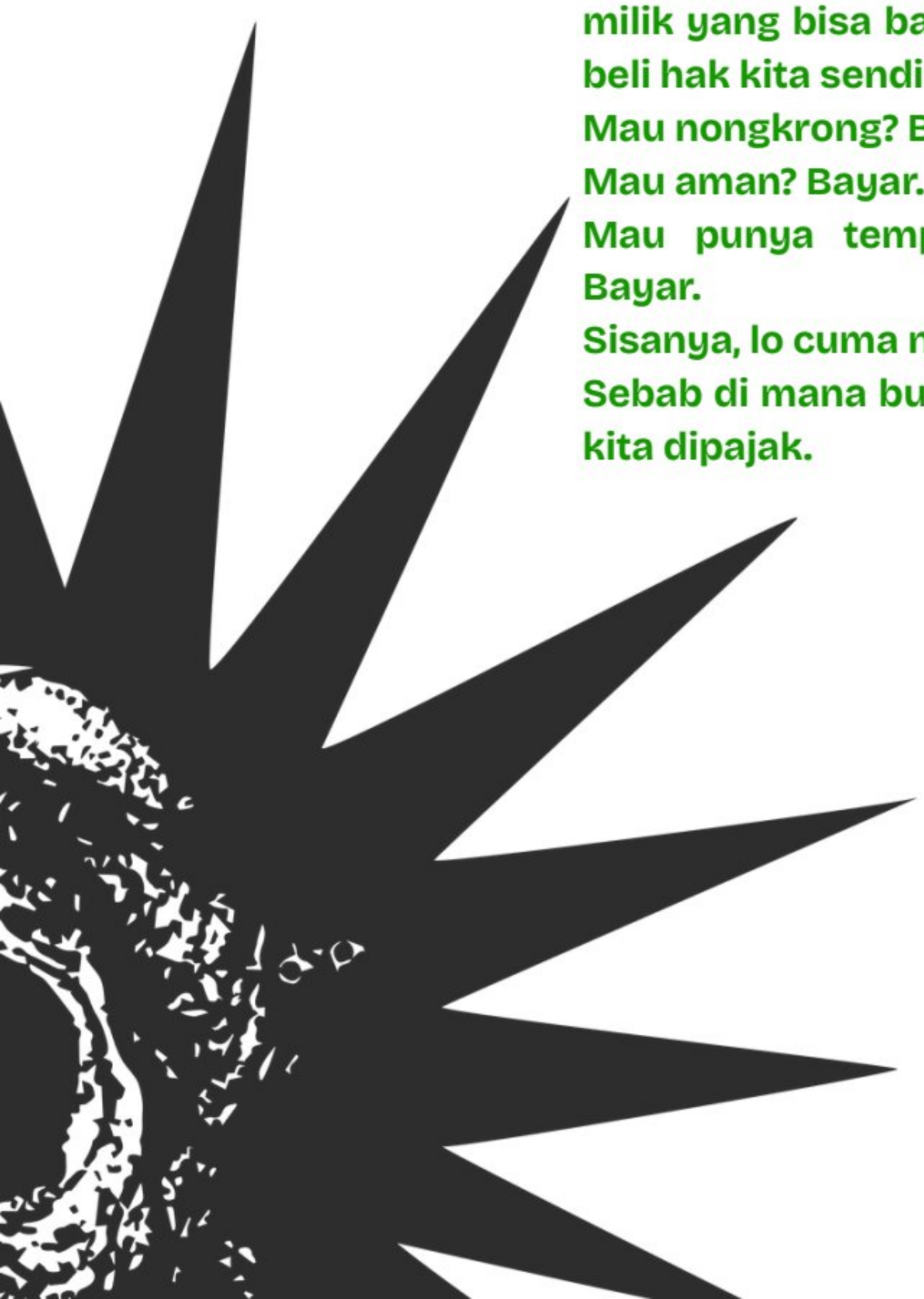

Sejarahnya udah panjang. Sejak zaman kolonial, kota bukan cuma tumpukan rumah dan gedung. Kota adalah proyek kekuasaan. Henri Lefebvre, orang yang pertama kali ngelontarin istilah The Right to the City, udah bilang: kota itu arena rebutan. Yang punya kuasa — politik, ekonomi — dia yang nentuin bentuk kota. Sisanya? Cuma penumpang, cuma disuruh nurut.

Lihat Bogor. Dari zaman Belanda, Bogor udah didesain jadi kota "elitenya" kolonial. Buitenzorg, katanya — kota tanpa risau. Tempat gubernur jenderal leha-leha, tempat orang kaya beristirahat. Yang diusir? Yang dibungkam? Ya rakyat. Ya pribumi. Ya kita.

Dan jangan kira itu berhenti waktu Indonesia merdeka. Kota ini tetep dibangun buat segelintir orang. Cuma ganti seragamnya aja. Dari kolonial jadi oligarki lokal. Dari Belanda ke pengembang. Dari tentara asing ke aparat kita yang najisnya brutal.

Dulu kekerasan dating terang-terangan, pake bedil. Pake senapan. Sekarang? Lewat aturan. Lewat police line. Lewat surat izin. Surat keramaian. Lewat jam malam yang katanya demi ketertiban.

"**Biar nggak ada kriminal,"** kata mereka.

Tapi kita semua tahu, yang diawasin itu kita — warga biasa. Yang dicurigain itu remaja yang nongkrong di pinggir jalan. Yang dibubarin itu pedagang kaki lima, pemuda yang ngamen, orang-orang yang sekadar duduk ngobrol lapakan.

Sementara yang kriminal beneran? Korporasi yang gusurin kampung. Developer yang culikruang hijau. Aparat yang kerjanya ngejagain kepentingan bisnis. Mereka nggak pernah dibubarin. Mereka dilindungi.

Jadi siapa yang sebenernya diawasin? Siapa yang dilindungin?

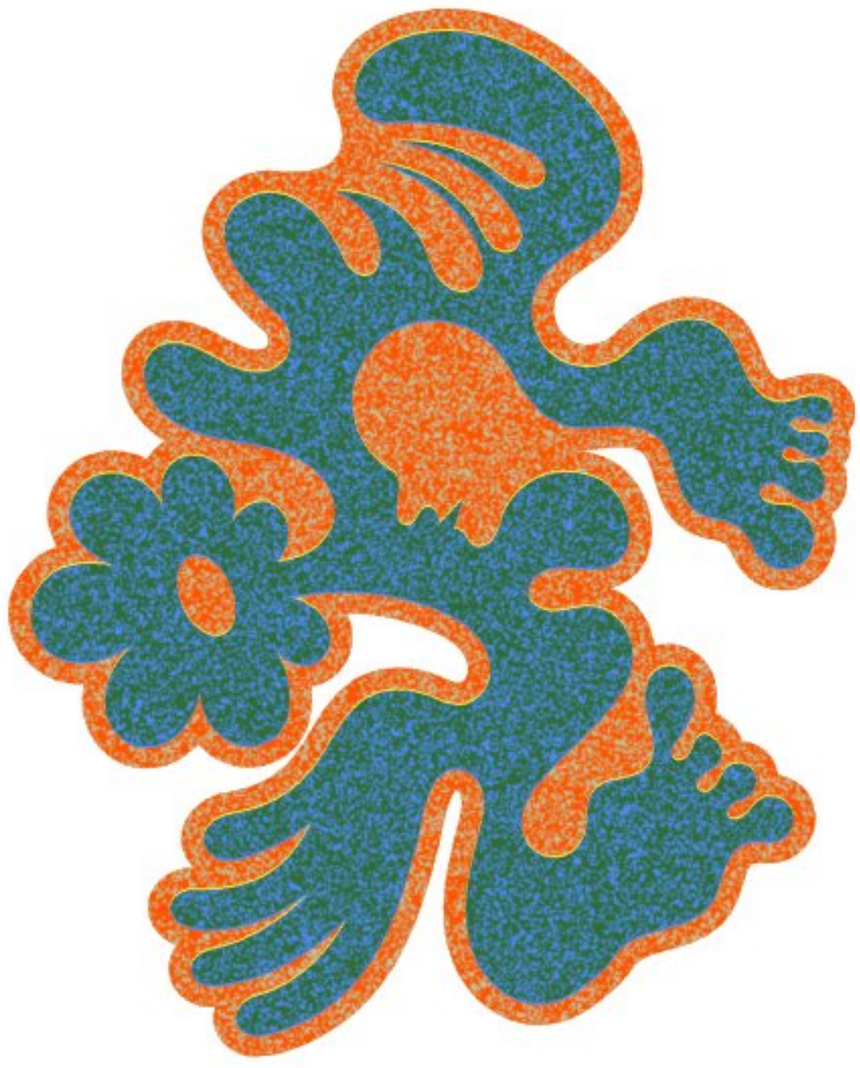

Coba inget, berapa banyak kampung yang digusur atas nama "penataan"? Berapa pasar yang disulap jadi mall? Berapa trotoar yang dipersempit buat parkiran?

Ini semua pola global. Neoliberalisme udah lama ngejajah kota.

Lefebvre udah wanti-wanti: saat kota cuma dilihat sebagai komoditas, maka ruang publik hancur. David Graeber nambahin: yang hancur bukan cuma ruang, tapi relasi sosial, solidaritas, rasa aman. Karena kota yang dijual bukan cuma gedung-gedungnya, tapi hidup kita.

Dan yang lebih nyesek, kita sering diajarin buat nerima itu semua. Diajakin bangga sama kota yang makin mahal. Makin licin. Makin rapi. Padahal pelan-pelan, kita sendiri yang dikunci di luar pagar.

Pertanyaannya balik lagi: kota ini milik siapa?

Selama kita diem, jawabannya jelas: bukan milik kita. Selama kita cuma nonton, jawabannya: milik mereka. Selama kita terus tunduk, kota ini bakal terus jadi mesin buat ngusir kita. Dengan perlahan. Dengan pelan-pelan.

Tapi kita masih bisa rebut.
Dengan marah.
Dengan lawan.
Dengan nuntut ruang.
Dengan ngerusak ilusi yang tiap hari mereka pajang:

Bahwa kota ini cuma buat yang bisa beli. Cuma buat yang bisa sewa. Cuma buat yang bisa diam-diam nyaplok ruang pakai kuasa. Padahal kota ini harusnya buat semua yang berani hidup di dalemnya. Dan kita nggak dikasih pilihan lain.

Albert Sterner (American, 1863 – 1946)

Selain bergerak bersama merebut apa yang menjadi hak kita sebagai warga kota. Dan itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Dengan penolakan. Dengan perlawanan. Dan kota ini tidak akan pernah jadi milik kita — kalau kita terus diam.

Bogor, 02 Juli 2025

1 ABAD PENJAJAHAN RUANG JALANAN UMUM

Oleh Hasan Ali Rahman

Di kota manapun, ruang umum terbesar ialah jalanan. Ruang umum dalam hal ini adalah ruang yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh setiap warga tanpa terkecuali. Tanpa batasan. Namun pada kenyataannya, ruang jalanan kita dikuasai oleh segelintir orang saja, yakni pengguna ranmorib (kendaraan bermotor pribadi, seperti mobil dan sepeda motor), warga yang tidak cukup kaya untuk memiliki atau menyewa ranmorib akan disisihkan dan digilas (kadang secara harfiah) untuk kepuasan diri.

Kemewahan ini bersandiwara sebagai kebutuhan demi biaya, waktu, keselamatan dan alasan-alasan pribadi yang justru tiap-tiap manusia juga berhak atas itu.

Johannes van Wijckersloot (Dutch, 1625-1687)

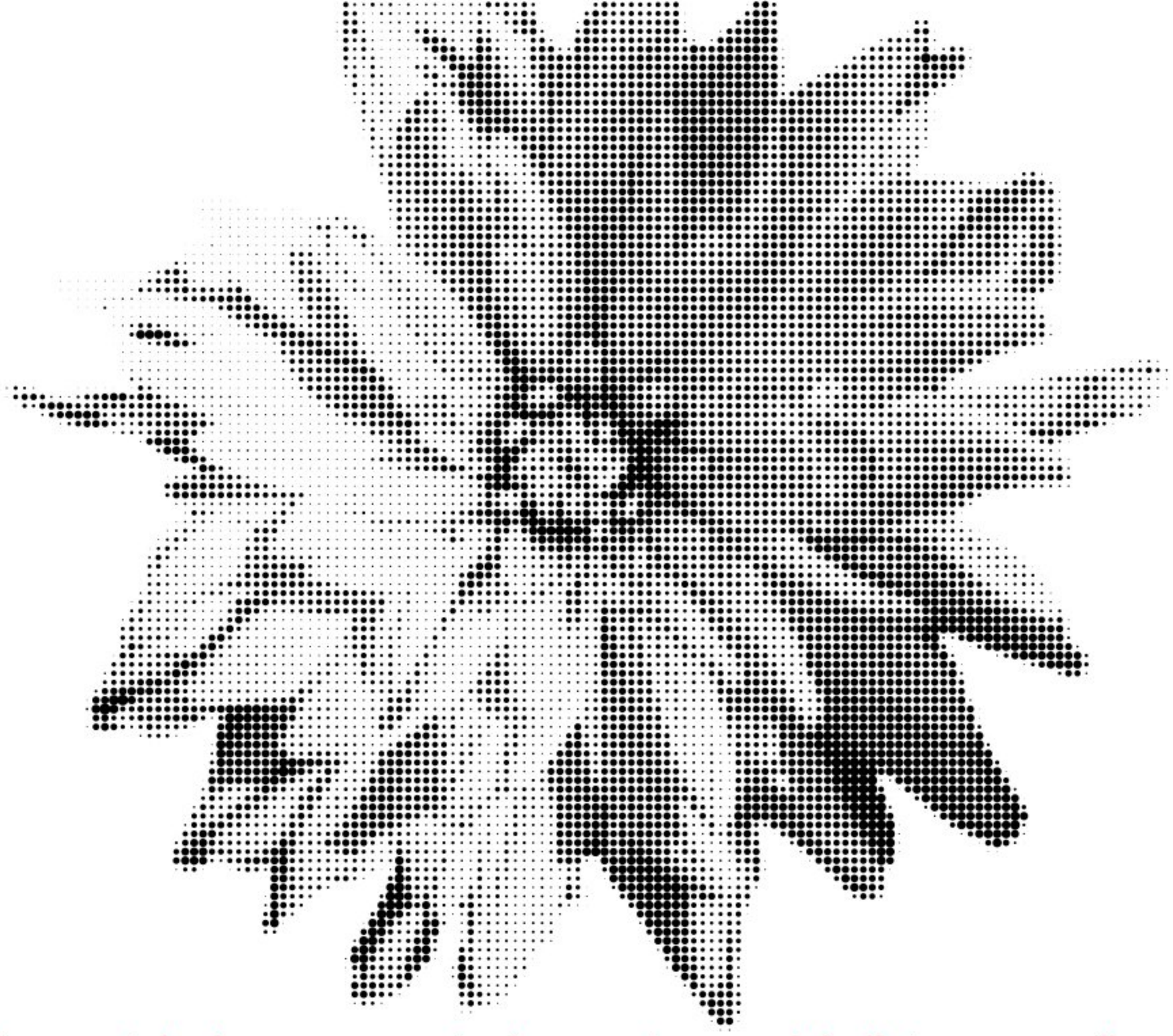

Sekalipun untuk alasan ransportasi, pengutamaan lalu lintas ranmorib sebagai tolak ukur pemanfaatan ruang jalanan tidaklah bernalar. Alasan besar ruang jalanan merupakan ruang umum terbesar adalah karena borosnya ruang yang dipakai oleh kendaraan pribadi. Satu mobil memerlukan ruang sekitar 10 meter persegi, dan sepeda motor 1.5 meter persegi, itu pun hanya ruang diam saat parkir yang perlu disediakan di tempat asal dan tujuan, belum ruang gerak saat berkemudi di jalan yang memerlukan jarak aman 6 meter setiap 10 km/j.

Sebuah bus kota bisa memenuhi kebutuhan angkutan masyarakat, lengkap dengan kenyamanan seperti mobil dan penghematan ruang setara berjalan kaki. Namun layanan angkutan umum yang semestinya terjangkau dan menjangkau seperti layanan umum lainnya–air, listrik, sinyal–justru diabaikan dan diserahkan kepada urusan tiap orang dengan perusahaan penjual ranmorib.

Perbandingan ruang jalan untuk mobil, sepeda dan bus untuk 60 orang.
(www.transportshaker-wavestone.com)

Kerugian terbesar dari pengutamaan ranmorib pada ruang jalanan justru terletak pada segi sosial. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ruang jalanan adalah ruang umum yang mana meski tujuan utamanya adalah angkutan tapi bukan satu-satunya.

Jalanan adalah perpanjangan dari tempat yang dihubungkan olehnya. Tempat tetangga saling menyapa. Tempat anak-anak bermain. Tempat penumpang mengobrol sambil menunggu angkutan umum. Tempat penjual asongan berdagang. Tempat pengamen dan pembicara memperdengarkan karyanya pada khalayak. Semuanya dilakukan dengan pengertian bersama. Melalui pandangan mata dan gerak-gerik tanpa kata. Melangkah dan menghindar bergantian bagai dansa.

Namun semua berubah pada tahun 1910-an, ketika pabrik kendaraan mulai menjual mobil untuk orang-orang kaya. Pembawaan yang sembrono dan sewenang-wenang dengan segera menimbulkan korban jiwa.

Ruang jalanan telah dijajah oleh pejabat dan pengusaha kaya yang seenak maunya. Tentunya masyarakat umum tidak tinggal diam. Petisi diluncurkan, pemasangan iklan koran, unjuk rasa dan pendudukan ruang jalanan terjadi di kota-kota besar yang membuat pabrik mobil kegerahan.

Hal ini mendorong mereka membentuk serikat pabrik mobil dan menggencarkan sogokan ke pemerintah untuk mengubah undang-undang dan peruntukan jalanan. Bahkan sampai sejauh menambahkan kurikulum 'keselamatan jalanan' untuk mencuci otak anak-anak agar mereka tidak mengingat jalanan yang adil dan terbuka.

Narasi pun berbalik dengan 'korban tabrakan' menjadi 'penyebab kecelakaan' lalu mendapat cap sebagai orang udik dan susah diatur. Pengemudi tidak bisa disalahkan saat pejalan kaki 'menyebrang tidak pada tempatnya'.

Market Street, San Fransisko, tahun 1906 (Denis Shiryaev, YouTube)
Tampak pesepeda, pengendara andong, seorang ayah menuntun anaknya, dan penumpang trem yang saling silang di tengah jalan dengan tenda pedagang di pinggir jalan.

[Kiri] unjuk rasa Stop de Kindermoord (jangan Bunuh Anak Kami) di Belanda. (manning.xyz)
[Kanan] iklan dari American Motordom yang menyebut penyebrang jalan sebagai jay-walker. (Vox)

Jalan Cibaduyut, Kabupaten Bandung, tahun 2025
(dokumentasi pribadi)
Seorang manula dituntun di atas kursi roda di antara mobil parkir dan melaju pada jalan tanpa trotoar.
Di latar, jalur Kereta Cepat Indonesia Cina, proyek prasarana angkutan termahal di Indonesia.

Penulis ingin berterima kasih pada tokoh-tokoh urbanisme yang telah mengajarkan dan mendorong kesadaran terhadap keadilan ruang sosial termasuk namun tidak terbatas pada: Kopeka (Koalisi Pejalan Kaki), Marco Kusumawijaya penulis Kota-Kota Indonesia, Stravenues di Twitter, Jason Slaughter pewara saluran Not Just Bikes di YouTube, dan Charles Marohn pendiri lembaga Strong Towns.

Tetapi, sama halnya jalanan kita bisa direnggut, maka kita juga pasti bisa merebut kembali hak kita semua. Dengan cara yang sama. Dengan berserikat dan berkelompok. Kita harus mengawal institusi dan kebijakan pemerintah dan kita harus menyebarluaskan kenyataan yang sesungguhnya. Untuk menumbuhkan kesadaran akan ketidakadilan yang terjadi dan nantinya akan memantik semangat perubahan. Kita harus mengembalikan ruang jalanan kembali pada masyarakat.

[Kiri] unjuk rasa Stop de Kindermoord (jangan Bunuh Anak Kami) di Belanda. (manning.xyz)
[Kanan] iklan dari American Motordom yang menyebut penyebrang jalan sebagai jay-walker. (Vox)

Dan dalam hal ini kita tidak sendirian. Ataupun mulai dari nol. Banyak kota yang menyelenggarakan hari bebas kendaraan. Perlu kita tanamkan bahwa keadaan seperti itu tidak harus dibatasi pada 6 jam tiap minggu pagi atau pada jalan tertentu saja. Kota-kota seperti Bogor, Jakarta, dan Bukittinggi berhasil membersihkan kawasan wisata mereka dari ranmorib. Mari kita usulkan hal yang sama di berbagai tempat lainnya. Di negara maju mungkin mereka tampak tak tersentuh oleh lobi serikat pabrikan mobil, tetapi justru mereka juga pernah terperosok namun berhasil sadar dan memperjuangkan kembali jalanan mereka. Mereka semua perlu dijadikan acuan, teladan dan dambaan oleh kita semua.

KOTA MILIK SEMUA

Oleh Kingking/@d.kingkingg

Pemuda medioker yang kebetulan suka menulis dan beranggapan bahwa tulisan hanyalah sekadar tulisan–tidak lebih dari itu.

“Waktu memang Jahanam, kota kelewat kejam dan pekerjaan menyita harapan,” begitu kegetiran tertulis di potongan lagu milik Silampukau yang bertajuk Lagu Rantau. Sedikit banyaknya, ia mewakili perasaan kita, setidaknya perasaanku seorang. Kota memang sudah kelewat kejam. Kaki kecil penuh debu yang menendangi bola plastik semakin terhimpit gawangnya oleh gedung entah milik haji RT berapa. Makin langka kicau-kicau anak kecil berlarian, berganti bising alat berat yang menggusur kampung kecil yang membawa cita-cita pembangunan futuristik. Tentunya, futuristik a la negara, a la kapitalistik pula.

Endonesia (maaf bila salah dalam penulisan, sebab aku agak lupa) per tahun 2025 memiliki 93 kota otonom dan 5 kota administratif dengan total populasi berjumlah sekitar 284.438.800 jiwa. Dari seluruh populasi tersebut, 52% meninggali wilayah perkotaan. Menyesakkan, bukan? Apalagi jika kau dan keluargamu bukanlah sosok yang “diundang” dalam pesta “pembangunan”.

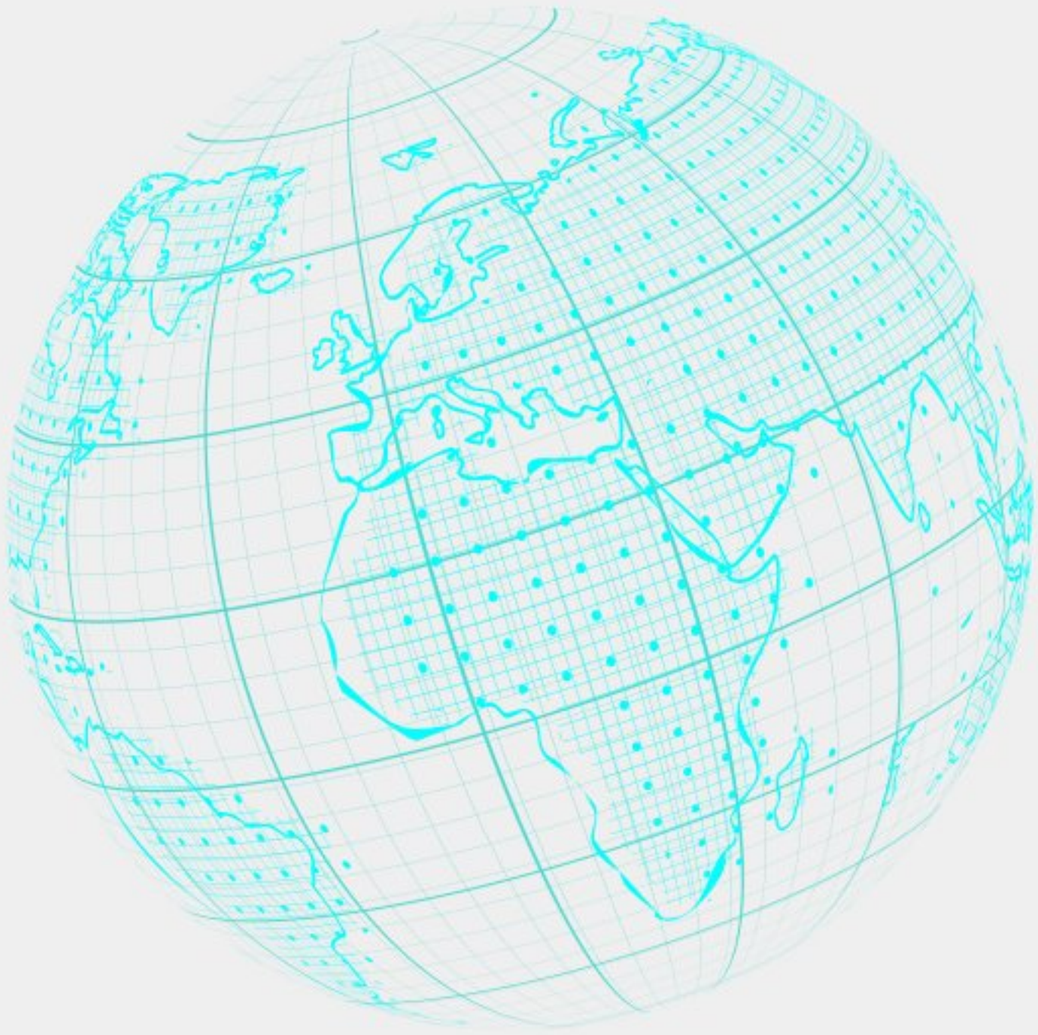

Di balik gemerlapnya lampu-lampu dan jalan yang makin lebar, kota menyimpan getir luka yang tak tampak di peta. Tak tampak di angka-angka data. Elit menyebutnya risiko modernisasi, pembangunan, atau transformasi urban. Tapi bagi kalangan akar rumput, risiko ini bukanlah hal yang membahagiakan. Kota menjadi ruang penuh mimpi dan harapan yang bersinggungan langsung dengan kelelahan, kelesuan, eksploitasi, dan penggusuran. Buruh industri, pelajar dan mahasiswa rantau, kelompok marginal, anak muda nyentrik dan lainnya–mereka mengadu nasib di sana.

Wajah kota sedang dalam ekspresi ramah atau marah adalah pertanyaan yang setiap hari mengetuk hati tukang becak yang terasing dari jalanan karena dianggap mengganggu arus lalu lintas. Tukang ojek online yang seakan dibiarkan terus berkonflik dengan tukang ojek pengkolan. Pedagang kaki lima yang dihantui razia. Warga kampung kota yang digusur karena merusak estetika. Hak atas kota telah direbut oleh peta tata ruang milik pemodal berselerakan estetika steril. Tak lagi ada ruang untuk sekadar menjemur pakaian karena matahari ditutupi beton tinggi. Bahkan tak ada ruang untuk bertanya: “Kami mau tinggal di mana jika tidak di sini?”

Sungguh aneh jika menganggap kampung kota dan seisinya sebagai beban pembangunan. Merekalah yang menghidupi kota. Merekalah yang menyapu jalan. Mengantar paket. Membangun rumah orang kaya. Menghidupi pasar agar selalu terjaga ketika matahari pagi menghiasi sunyi cakrawala. “Pembangunan” adalah kata yang membunuh secara perlahan. Kata itu keluar dari mulut penuh senyum birokrat yang wajahnya terpampang di spanduk warna-warni. Senyum itu pula yang menusuk seperti harga kebutuhan pokok yang kian tinggi ditambah terancam relokasi. Mulut yang hanya bisa senyum. Namun bisu dalam berbicara kepada warga tentang kejelasan harapan.

Kota tak perlu menjadi cantik namun asing bagi rakyat. Biarlah ia apa adanya saja jika negara tak bisa menjamin perut lapar akan kenyang bila mengadu kepada birokrat-birokrat. Biarlah tukang gorengan masih berjualan tepat di samping gubuk pemulung tua. Biarlah taman tetap menjadi taman yang siang hingga sorenya penuh anak berkejaran dan malamnya kumpulan pemuda sedikit menghibur diri dengan segelas bir, atau sedikit kecup kekasih di pojok remangnya. Toh, negara sendiri tidak pernah hadir baik untuk sekadar menyapa.
Selektif bukanlah sifat kota. Ia menampung semua yang tak tertampung oleh presiden dan menteri. Sertifikat, NPWP, rekening bank, bukanlah syarat yang diwajibkan oleh kota untuk bisa menumpang hidup di tanah airnya. Kota adalah rumah milik semua orang yang mengeluarkan peluh dan cintanya. Di sini pula, semuanya memiliki hak untuk hidup, bermimpi, merasa aman, dan dianggap manusia. Tantangan kita hari ini, hak itu tidak dibagi rata, ia jadi barang mewah. Dikapitalisasi negara

Borneo Selatan, Juni 2025

SENI, KOTA, DAN PERLAWANAN: SUARA-SUARA DI BALIK DINDING KOTA

Oleh Farhan Hardy

Di tengah riuh kota yang sibuk memburu waktu, seni berdiri seperti lampu-lampu jalanan: terus menyala, namun diam. ia tak bersuara, namun kekuasaan dapat diguncangkan olehnya. Kota seringkali digambarkan dengan inti dari sebuah peradaban, dan kemudian modernitas adalah ruang-ruang hidup yang dibentuk oleh warganya. Dalam benturan beton kokoh, seni tumbuh disela-sela dinding kota guna melawan segala bentuk ketimpangan, keterasingan, ketidakadilan, serta kekosongan eksistensi yang diam-diam menjalar pada sela-sela gedung pencakar langit.

Setiap Kota adalah konstruksi politik, ia bukan hanya tumpukan-tumpukan semen atau tata letak saja. Kota merupakan salah satu bentuk relasi kuasa yang saling terhubung dan tarik menarik antara penguasa, pemilik modal, dan masyarakatnya. Arsitektur tata kelola ruang kota tidak netral; tata ruang bisa jadi kontrol sosial. trotoar yang sempit, taman-taman yang diprivatisasi, mural yang dihapus, dan ruang-ruang publik lainnya. semuanya bagian dari mensterilkan wacana yang tidak sama sekali diinginkan oleh para pemangku kekuasaan. Namun di celah itulah seni muncul, seniman urban, pejalan kaki, muralis, musisi jalanan, hingga seniman performans, menjadi pembaca dan penulis ulang atas ruang kota. mereka hadir menjadi pengganggu keteraturan yang dipaksakan. Instalasi pada trotoar, mur di dinding kosong, puisi di tiang listrik, dan bunyi pada lampu merah adalah bentuk perlawanan dan klaim pada ruang-ruang kota yang terus diperas oleh logika komersial.

Perlawanan dalam seni bukan selalu tentang demonstrasi atau kekerasan. Ia bisa hadir sebagai simbol yang membisikan keras di telinga kekuasaan. Bayangkan Banksy, yang mencoret dinding dengan kritik sosial; atau mural-mural di Yogyakarta yang memuat satire atas korupsi dan ketimpangan. Di Jakarta, Bandung, Makassar, hingga Kupang, kita bisa temukan geliat yang sama: seniman menjadikan kota sebagai kanvas sekaligus medan perang. Perlawanan semacam ini lebih dari sekadar estetika. Ia adalah cara bertahan hidup, cara menolak untuk dikerdilkan menjadi konsumen pasif dalam lanskap kapitalistik. Ia adalah penolakan terhadap "kota steril", yang menyingkirkan rakyat kecil demi "investasi besar".

Seni melawan dengan cara halus: mengganggu makna, menolak dilupakan, dan memaksa orang melihat yang selama ini dianggap biasa. Ketika musik indie menggema di lorong kota, ketika teater jalanan mengangkat kisah buruh atau warga tergusur, seni berubah menjadi senjata yang tidak mematikan, tapi menggelisahkan.

Samuel Ehrhart (American, 1862-1937)

ASEBUT HAK KOTA
MOSi
TIDAK
PERCAYA
BHAYANG
KARA

K O T A - K I T A - K A T A

Entah tentang kota yang lenyap
Tentang kita yang hilang
Atau kata yang sunyi senyap

Di antara kota, ada kita yang kadang tidak bisa berkata
Di antara kita, ada kata yang abadi di tengah kota
Di antara kata, ada kota yang menjadi puisi bagi kita

Aku cinta kota
Aku mencintai kita
Aku dicintai oleh kata

Kota kini bukan lagi menjadi kata-kata bebas untuk kita
Karena kita bukan lagi kata-kata yang aman untuk kota
Dan kata-kata kini tak mampu mengumpulkan kita di kota

Kota telah dirusak oleh kita.
Kota telah dinodai oleh kata.
Kota-nya... telah hilang.

Kita bukan apa-apa
Kita tidak pernah memiliki ruang di kota
Kita tidak pernah bisa berkata

Katanya kota kita
Tapi kata bukan lagi milik kita
Tapi kata bukan lagi berbicara perihal kota

Cukup sudah aku mendengar setiap desahan di setiap lorong gang yang tak mempunyai nama.
Teriakan dari setiap perut yang meronta-meronta bermimpi Dewa akan menurunkan makanan dari langit.
Serta bayi-bayi yang terus mengigau berharap air susu turun dari payudara ibu mereka.

Kota ini bentuknya minimalis
Dengan kita yang selalu terlihat miris
Dan selalu bergaya layaknya politis

Entah sampai dimana kita akan selalu berakhir tragis
Mungkin kata yang tak sempat tertulis
Atau kota yang akan mungkin selalu menangis

Catatan seorang Calon Ibu RT Setempat, 2025

BAGAIMANA JIKA GELANDANGAN ITU ADALAH KITA?

Oleh Odooong

Senjakala di bangku taman itu, aku menyaksikan;
Lelah, letih, dan lesu
Mendekap tubuh seorang gelandangan yang kumal

Ia tertidur pulas
Ia
Tertidur
Pulas

Pulas sekali pejam matanya
Hingga tak sempat menyaksikan
Sinisme dan cacian orang-orang
Hilir mudik silih menaruh rasa enggan untuk mendekatinya.

Di kerumunan yang tak jauh darinya
Seseorang menghubungi dinas sosial
Seseorang lainnya menghubungi polisi
Dan sisa lainnya, acuh.

Polisi datang
Dinas sosial menyusul
Kamera ada dimana-mana
Di sudut-sudut yang tak lagi peduli privasi

Seorang gelandangan tak berdaya
Menahan lapar, menahan derita, menahan segala macam bentuk keterasingan
Di bangku taman, yang rapih tertata.

Setelah semuanya,
Hari-harinya hanya sanggup melahap kecewa
Atas perkembangan dan pembangunan tata kota yang tak peduli pada nasib warganya.

KOTAK

(Pram 1923)

Kotak terkotak
Terkotak kotakan
Sembari menunggu
Tuan dan nyonya menjadi botak

Sela tersela
Tersela selakan
Tanpa berkeringat
Tuan dan nyonya menerima pundi

Jadi jadikan
Jadikan jadi
Hanya tau kulitnya
Isinya pun tuan dan nyonya kuliti

Bisu bisukan
Bisukan bisu
Ruangan menjadi sunyi
Tuan dan nyonya membungkamkan diri

BABI

(Pram 1923)

Makanmu apa?
Minummu apa?
Apakah pantas seperti itu?

Tuan jangan membela kami
Nyonya jangan sok membuka hati
Kami ada harga diri

Urus lah kongkanganmu
Jangan campuri isi kepalaku
Makan seperti babi
Minum seperti ular

Sifat Membentuk & Memaknai Kehidupan Kota

Oleh: Teguh Tri Fauzi

Jika kita membaca dan melihat sehimpun persoalan yang terjadi di Bogor secara luas, khususnya Kota Bogor akhir-akhir ini, sepertinya Bogor sedang mengalami suatu evolusi hidup ke arah yang hendak mendewasakan masyarakatnya, menyadarkan apa dan bagaimana fungsi pemerintahannya. Hal ini cukup menggembirakan. Dan peristiwa ini mesti dicatat, direkam, diberitakan, dan diarsipkan: "sebab tidak akan ada revolusi besar tanpa revolusi perkotaan, dan revolusi kehidupan sehari-hari" (meminjam gaya berpikir Henri Lefebvre), lalu saya lanjutkan, tidak akan ada juga revolusi besar tanpa revolusi pedesaan.

Bogor seakan tengah melakukan perenungan panjang memaknai kehidupannya, membentuk kembali arah hidupnya, dan keduanya itu hadir atas sifat kemanusiaanya yang baru. Sifat membentuk dan memaknai bahwa sejarah bukan untuk dipuja-agungkan, melainkan untuk dipelajari nilainya. Sifat membentuk dan memaknai bahwa kebudayaan bukan untuk diamini/dipercayai, melainkan untuk dimaknai citra dan gunanya. Sifat membentuk dan memaknai bahwa kesenian bukan untuk dipandang sebagai estetika yang lahir dari neuron kesucian Tuhan, melainkan untuk diperjalankan kesadaran reflektif-kolektif manusianya, alam lingkungannya, dan bahkan kesadaran untuk membentuk hal-hal baru, kemungkinan-kemungkinan baru, yang berangkat dari memaknai persoalan hidup masa lampau—yang berguna sebagai bekal hidup masa depan.

Kesadaran itu membawa potret bagaimana Bogor sebagai ruang hidup, sebagai hunian, mulai ditinjau kembali dari pelbagai sudut pandang, gerak pandang, jarak jangkauan pandang yang kritis-radikal: apa makna kota, apa makna desa, di mana dan apa posisi masyarakatnya, di mana dan apa posisi pemerintahannya, dan seterusnya, mengarah pada persoalan fasilitas, hak, kegunaan, kepemilikan atas huniannya: Bogor, menjadi sehimpun polemik yang mesti dijawab bersama-sama.

Duduk-perkara kehidupan kota akan mengantarkan kita pada tawaran berpikir dari Henri Lefebvre (Le Droit à la Ville 1968, The Urban Revolution 1970, The Production of Space 1974) yang membahas ruang ke dalam sebuah dialektika yang lebih konkret—yang bertukar-tangkap antara ruang/hunian sebagai sesuatu yang materil dan memiliki bentuk fisik yang nyata dengan fenomena ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Ia menawarkan fenomenologi radikal untuk melihat ruang melalui pendekatan yang lebih humanis, di mana hak atas kota yang dimiliki baik oleh individu maupun komunitas mulai terabaikan oleh upaya pengabstraksian ruang yang dilakukan oleh kapitalisme dalam berbagai bentuknya, serta pengetahuan teknokratik terutama oleh pihak negara, pemerintah, atau para penguasa.

Kerangka berpikir Lefebvre tersebut mencerminkan bagaimana akhir-akhir ini beberapa kelompok/komunitas di Bogor sulit mengakses ruang publik dan bahkan dibatasi, dalam hal ini taman kota dan ruang publik terbuka misalnya, yang dengan dalih keamanan dan jam operasional. Belum lagi soal masyarakat seniman-pegiat kreatif yang tidak mendapatkan fasilitas dan ruang publik layak-aman-nyaman. Selain itu, masyarakat Kota Bogor juga dihadapkan dengan investasi perkotaan yang masif berwujud pembangunan gedung, wilayah perkantoran, industri, serta berbagai infrastruktur eksklusif lainnya yang hanya dirasakan manfaatnya oleh sekelompok orang saja, tetapi tidak bagi sekelompok masyarakat lainnya.

Dalam kasus itulah, Bogor dapat membersamai tawaran Lefebvre untuk menjadikan gerakan berpikir ulang apa makna kota, sebagai upaya membentuk kehidupan kota yang benar-benar masyarakatnya mendapatkan hak dan kepemilikan atas kotanya sendiri. Jelas, ini merupakan suatu tawaran dari interteks ke interaksi-sosial dalam mempraktikkan sebuah teori berpikir yang metodologis: baik guna maupun dampaknya.

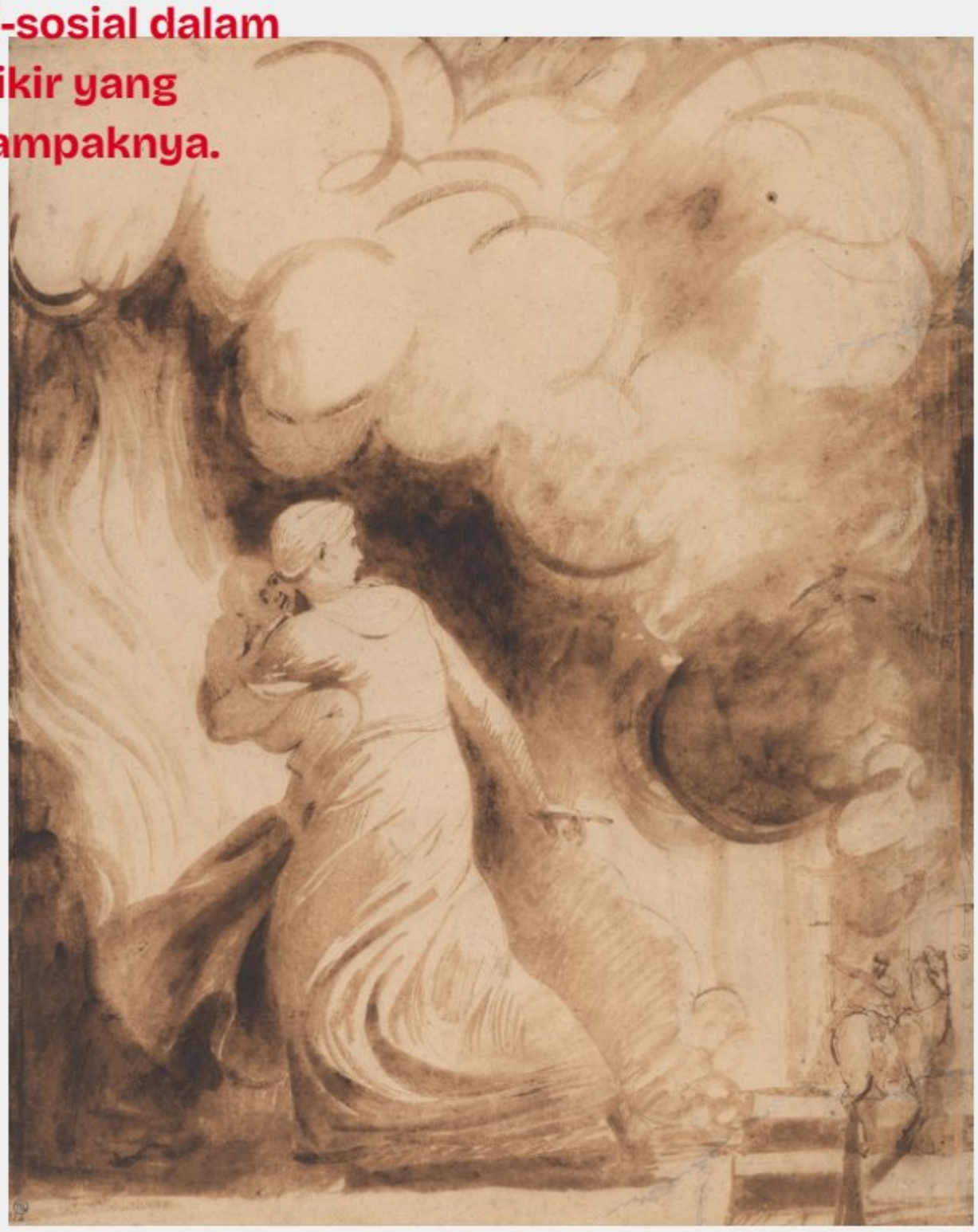

George Romney (English, 1734-1802)

Sebab, Bogor sudah berada dalam genggaman industrialisasi kapitalis. Dan Bogor selain juga dimaknai sebagai objek yang diciptakan oleh tindakan hasrat segelintir manusia yang berkuasa, juga dapat dipahami bagaimana gotong-royong relasi antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang mempersempit gerak hidup masyarakatnya sendiri. Itulah mengapa Bogor bisa dimaknai sebagai, oleh segelintir penguasa, dijadikan sebagai tempat pertukaran dan pencarian keuntungan saja, untuk menarik wisatawan saja, bahkan penanaman modal saja, tanpa memikirkan hidup masyarakatnya sendiri sebagai bagian dari denyut kotanya, hak atas kepemilikan hunian plus lingkungannya.

Hal itu akan jauh diperjelas ketika kita membaca uraian Lefebvre yang mengadopsi pemikiran teori konflik Niccolo Machiavelli, bahwa ruang hidup di Bogor sudah menjadi sebuah arena pertarungan antara “the minuto popolo” (small people) dan “the popolo grasso” (fat people), antara mereka yang memiliki kuasa dan kewenangan dalam berbagai macam bentuknya dengan mereka yang bahkan suaranya saja tidak dapat terdengar di masyarakat. Dalam arti inilah kita bisa melihat Bogor sebagai wilayah yang sudah menjelma menjadi sebuah ruang konflik (a place of conflict): Mereka yang berkuasa dan memiliki kewenangan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengatur bagaimana Bogor mesti dibentuk dan dikelola, sedangkan masyarakatnya hanya menjadi penonton, sesekali menjadi korban dari kekuasaan itu sendiri.

Maka dari itu, adalah hal yang sangat menggembirakan, ketika komunitas/kelompok di Bogor bersama-sama mengokupasi kotanya sendiri, huniannya sendiri, ruang-ruang yang menjadi fasilitas dan hak hidupnya sendiri, dengan atau melalui serangkaian penyadaran akan kemerdekaan hidup, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan kritis-analisis, kemerdekaan membentuk-mencipta, kemerdekaan memaknai, kemerdekaan merevolusi hidupnya sendiri, dan tentu saja sebagai warisan untuk masa depan regenerasinya nanti.

Dan memang begitulah fitrahnya, segala yang cacat mesti kita catat: kita revisi, kita benahi, kita narasikan, kita maknai, dan kita mesti berpartisipasi, entah dalam laku seni, laku budaya, laku kreatif, atau laku apapun, untuk terlibat aktif mengelola kehidupan Bogor ini. Dengan demikian, masyarakat Bogor tidak hanya dilihat sebagai pihak pasif yang hanya tinggal, menjalani aktivitas, serta menerima kebijakan-kebijakan yang merugikan dengan lapang dada begitu saja terkait pengelolaan kotanya, melainkan mesti juga dapat dan harus berperan aktif turut serta dalam berbagai macam bentuk tata kotanya, arah kebijakan, plus mesti aktif mengelola kehidupan kotanya: sebagai penghuni yang memiliki hak mutlak atas huniannya.

Pamijahan-Bogor, 2 Juli 2025

NONA MAR (MARSINAH)

NONA MAR (MARSINAH)

NONA MAR (MARSINAH)

NONA MAR (MARSINAH)

NONA MAR (MARSINAH)
NONA MAR (MARSINAH)
NONA MAR (MARSINAH)
NONA MAR (MARSINAH)
NONA MAR (MARSINAH)
NONA MAR (MARSINAH)
NONA MAR (MARSINAH)
NONA MAR (MARSINAH)

Oleh malesnormal

ia yang berani berbicara lantang
tanpa pandang siapa yang di lawan
demi sebuah keadilan
demi keselamatan kawan kawan

ia yang menuntut kesejahteraan
bagi setiap keringat dan peluh kawan
harus lenyap ditiadakan, ditiadakan

nona mar yang berani
tak pandang bulu
nona mar yang tak gentar
meski nyawa diregang serdadu

SEBUAH KENYATAAN, FASILITAS KOTA (BUKAN) MILIK KITA LAGI

Oleh malesnormal

yang dikeruk adalah secercah harap
yang dirampas adalah sekarung kebahagiaan

kota ku tercium kapitalis
ketika ruang publik
tapi terbatas untuk publik
lucu

yang ditata kota nya
yang tertata fasilitas nya
yang dijauhkan malah manusia nya
lantas semua ini untuk siapa?

kotaku adalah narasi panjang
sebuah tanda tanya
kotaku tak khayal taman bermain anak
anak di pusat mall (terbatasi/eksklusif)
kebebasan hanya sebagian
sisanya hanya untuk pajangan

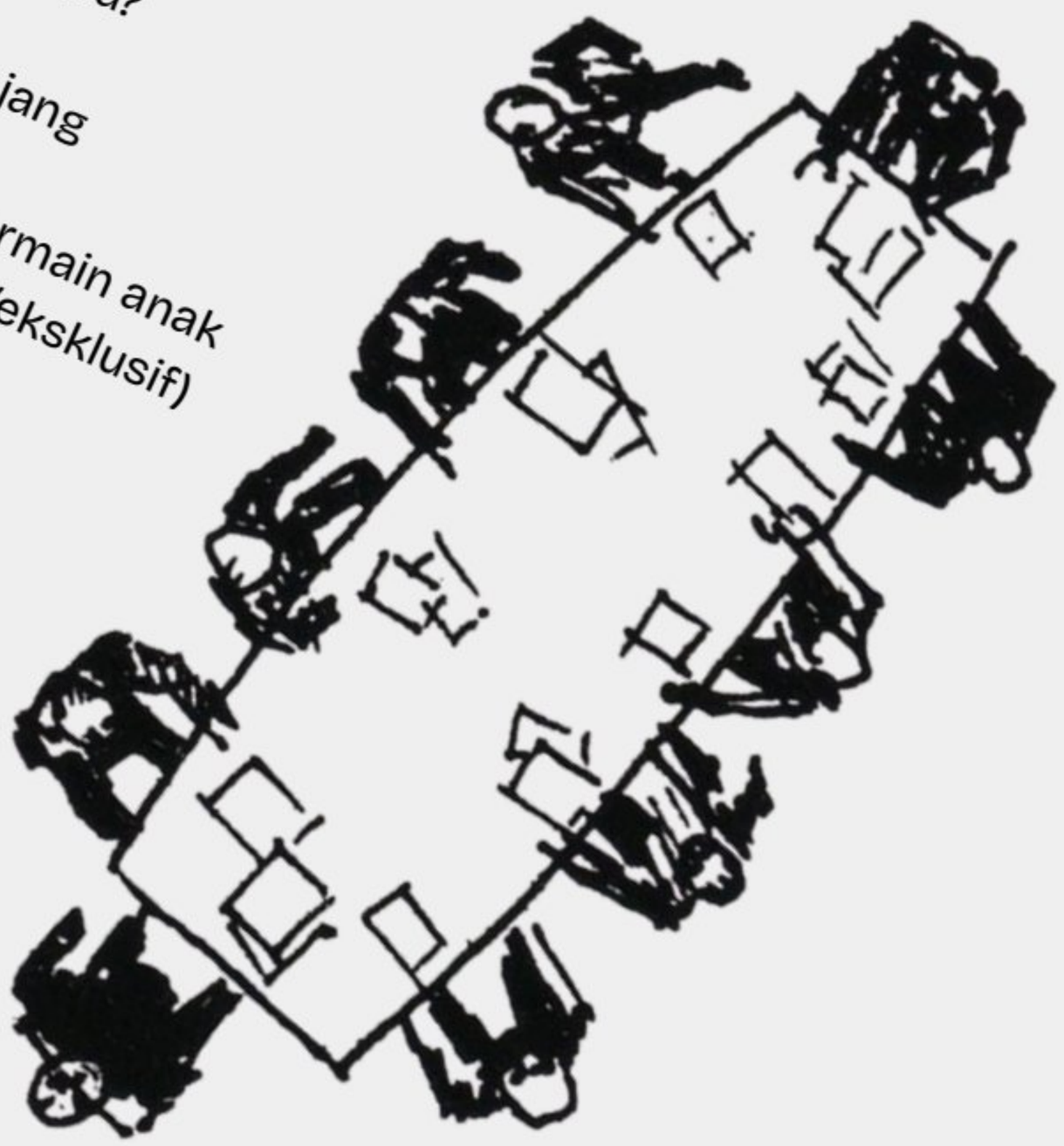

KONSTELASI HALITOSIS

Oleh wese

Berawal dari terjejalnya kami akan banyaknya instalasi. Dipasang dalam banyak bentuk yang jujur saja, kami tak mengerti fungsinya. Taman kota kebingungan, mereka digarisi polisi seakan menolak berfungsi dan sedikitnya ku dengar mereka bersuara, “Kami masih muda, belum memerlukan peremajaan.” Sungguh, aku bersimbah. Dihujani gemerlap lampu dan cahaya, mereka sibuk mengerjap setiap detiknya. Namun kami lagi-lagi sirna. Tercekal hanya karena memberi sebutir nasi, sepotong kain, ataupun seteguk kebahagiaan. Sudah semua mereka lakui; mengusir, menggeledah, “Hei push-up 50 kali!” Tak perlu risau membanding-bandingkan, mau ringan atau berat kalau dibungkam jelas saja keanehan! Namun kami takkan mati karena tragedi.

Kota Dibangun untuk Menjauhkan Menyingkirkan, dan Menjaga Dingin.

Oleh: Farhan Lazwardi

01•26
Stop!

KARENA

siapa saja yang hidup hanya benalu

yang berlari untuk menjemput kehilangan

help the
homeless
around
you
kesehatan
Food
Not
Bombs
20 • Lapak Baca Bogor
24 - Help The Homeless

help the
homeless
around
you
kesehatan
Food
Not
Bombs
20 • Lapak Baca Bogor
24 - Help The Homeless

CATATAN MINUM TEH DI TAMAN KOTA.

Oleh: Maria Magdalena (@toketriot)
Dapat diketuk melalui email: mimpilahseliarliarnya@riseup.net

Hari ini aku pulang kerja lebih awal. Badanku masih capek, kepalaku masih penuh, tapi langit sore lumayan ramah. Jadi aku mutusin buat mampir ke taman deket tempatku bekerja. Duduk sebentar, sambil iseng beli teh hangat dari abang-abang yang sepedanya diparkir di bawah pohon trembesi tua. Tehnya nikmat sekali, bukan cuma karena gulanya pas tapi karena harganya cuma lima ribu. Ngga ada branding yang gimana banget ataupun klaim-klaim organik. Hanya teh celup biasa, dalam gelas plastik murah. Tapi terasa hangat dan cukup.

Belum sempat kepala ini benar-benar tenang, tiba-tiba datang Satpol PP. Langkah mereka cepat, mukanya dingin dan malesin banget. Mereka langsung nyamperin abang penjual minuman dan mulai menertibkan. Si abang buru-buru beresin termos dan gelas-gelasnya. Kesannya jadi kayak teh itu barang ilegal, dan dia seolah ancaman negara.

Aku cuma bisa diem. Rasanya kesal. Di tengah letihku, masih harus menyaksikan ini.

Kota ini ngga nyaman. Duduk lima menit bisa jadi tindakan ilegal, tergantung kamu siapa dan kamu duduk di mana. Kita pikir kita punya hak atas kota ini. Tapi nyatanya, kota ini bekerja persis seperti yang diinginkan kapitalisme. Memilah, memfilter, menata ulang siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus disingkirkan pelan-pelan. Lewat cara paling halus, standar.

STANDAR KEBERSIHAN.
STANDAR KETERTIBAN.
STANDAR KEAMANAN

Percayalah, semua kalimat itu terdengar baik sampe kamu sadar dan refleksi siapa yang sering dianggap ngga bersih, ngga tertib, dan ngga aman.

Katanya kita punya ruang publik. Tapi ruang publiknya dijaga bukan buat warga miskin kota seperti kita. Jualan teh pake sepeda sampe dikejar petugas tapi booth kafe yang jual cold brew tiga puluh lima ribu boleh mejeng di trotoar. Sama-sama jualan, sama-sama pakai ruang yang sama. Tapi nasib beda karena satu dianggap mengganggu, satu lagi mendukung ekonomi kreatif.

Gentrifikasi ngga selalu datang dengan alat berat, cuy. Gentrifikasi menjadi proses politik-ekonomi yang nyamar jadi perbaikan estetika. Di permukaan dia terlihat bikin kota jadi lebih bersih, cantik, dan “layak huni”. Tapi di balik itu, dia seperti racun yang perlahan mengusir orang-orang yang dulu membentuk kota ini.

Dulu aku pikir gentrifikasi itu soal orang kaya pindah ke lingkungan yang dulunya "kumuh." Tapi ternyata, lebih licik dari itu. Gentrifikasi menjadi ruang yang dipoles dan dikemas ulang agar bisa dijual ke kelas yang dianggap lebih berdaya beli. Dan untuk itu, yang lama harus disingkirkan. Pelan-pelan.

Seringkali pola ini berulang. Sebuah kampung dekat pusat kota dianggap kumuh. Kemudian masuk "program revitalisasi" dari pemerintah. Warga dipindahkan ke rusun yang jauh. Lahan kosong. Investor masuk. Lalu berdirilah kafe, coworking space, atau apartemen. Dan lingkungan yang dulu katanya "ngga layak" mendadak jadi mahal. Harga tanah naik. Warung kelontong tutup. Naiklah gerai kopi. Satu per satu, yang lama menghilang. Dan tiba-tiba, kawasan yang dulunya disebut kumuh jadi disebut "area kreatif berkembang."

Aku pernah lihat itu terjadi di beberapa titik kota. Di mana anak-anak kecil yang dulu main layangan sekarang dibilang berisik. Ibu-ibu yang nyuci di depan rumah sekarang dibilang ganggu pemandangan. Di mana warga yang puluhan tahun tinggal di situ jadi merasa asing di lingkungan sendiri. Yang paling menyedihkan dari gentrifikasi adalah gimana membuat orang yang bertahan terlihat seperti pengganggu. Musik dari rumah warga dianggap polusi suara, tapi live music dari rooftop bar disebut ambience.

Yang lama ngga pernah benar di mata yang baru.

Gentrifikasi membuat kita merasa asing di kota sendiri. Membuat kita merasa kita yang harus menyesuaikan. Dan kalo kita ngga bisa ikut gaya hidup baru itu ya sudah, kita dianggap ngga relevan. Gentrifikasi bukan tentang benci orang kaya atau orang baru, tapi struktur kekuasaan dan kepemilikan ruang. Karena yang punya modal bisa menentukan arah ruang kota, mempengaruhi kebijakan dan beli opini publik lewat kampanye gaya hidup. Gentrifikasi berjalan karena tanah dan ruang dianggap komoditas, bukan kebutuhan dasar.

Kelas menentukan akses ke hal-hal dasar. Seperti air bersih, transportasi, internet, dan ruang hijau. Yang kaya tinggal di apartemen dengan gym dan taman privat. Yang miskin tinggal di gang sempit, ngangkot tiap hari, dan kalo taman kota ada sering dibatasi aksesnya. Kadang rasanya kalo kamu miskin, kamu cuma boleh jalan lurus-lurus aja. Ngga boleh melambat, apalagi istirahat.

Kadang aku refleksi, siapa sebenarnya yang dianggap sah tinggal di kota ini? Karena dari caranya kota ini dibangun, dirancang, ditata ulang, jawabannya jelas bukan untuk orang miskin seperti kita. Warga miskin kota selalu dianggap sebagai masalah. Dianggap mengganggu estetika, bikin macet, kumuh, dan mengganggu pembangunan. Tapi jarang ada yang mau mengakui bahwa kota ini bisa hidup justru karena kami. Kami yang kerja dari pagi buta sampe malam, ngurus logistik, bersih-bersih kantor, nganter paket, nyapu jalan, masak di warung, dan jaga parkir.

Tanpa kami, kota ini lumpuh. Tapi kami ngga pernah masuk dalam rencana kota. Coba lihat di pinggir sungai, pinggir rel kereta, di bawah jalan layang, atau di bekas-bekas lahan terbengkalai. Di sana berdiri rumah-rumah kecil dari triplek, seng, dan kayu bekas. Ada jemuran yang menggantung rendah, suara anak-anak main bola, ibu-ibu yang masak pakai kompor gas satu tungku. Hidup seadanya. Tapi penuh usaha buat bertahan.

MISKIN KOTA SEPERTI KAMI SERING DISEBUT ILEGAL. TAPI APA KAMI PUNYA PILIHAN?

Kota ini ngga pernah menyediakan perumahan murah yang benar-benar bisa dijangkau oleh penghasilan rendah. Harga kontrakan di pusat kota terus naik. Kredit rumah? Ngga masuk logika upah minimum.

KAMI DISEBUT LIAR; PADAHAL KAMI CUMA BERUSAHA TETAP HIDUP.

Tiap kali ada penggusuran, pemerintah selalu bilang: “kami hanya menegakkan aturan.” Tapi aturannya siapa? Dibuat dengan logika siapa? Tata ruang kota dibuat berdasarkan kepentingan kapital, bukan kebutuhan warga. Kami ngga diundang dalam rapat-rapat perencanaan kota. Tapi kami yang paling sering dibilang melanggar.

Yang bikin aku salut adalah bagaimana warga miskin kota seperti kami seringkali bertahan bukan karena dibantu negara, tapi karena mengandalkan satu sama lain. Di tengah sempitnya ruang, kami membangun sistem sendiri seperti iuran untuk listrik dan gotong royong bangun jembatan kecil. Kami bikin sistem hidup alternatif, karena sistem formal ngga pernah menganggap kami penting. Kota ini menyebut kami beban.

api kenyataannya, kamilah yang paling kuat menanggung beban kota.

Warga miskin kota seperti kami seringkali ngga hanya disingkirkan secara fisik, tapi juga secara imajinatif. Dalam peta kota, brosur properti, dan proyek urban visioning, kami ngga ada. Kami dianggap noda yang harus dihapus, bukan warga yang harus dilibatkan. Padahal kami punya sejarah. Kami lebih dulu tinggal di situ. Kami punya relasi sosial yang dibangun dari waktu, bukan uang.

TAPI KOTA MODERN BENCI YANG NGGA BISA DIMONETISASI.

Aku nulis ini sambil duduk di pojokan taman kecil. Masih ada sisa-sisa ruang yang belum dipagari. Di seberang, aku lihat baliho baru:

Dan aku sadar, “future” itu bukan buatku, abang penjual teh, tukang tambal ban, atau anak-anak yang main bola di jalan. Kami ngga dianggap bagian dari visi kota. Tapi aku, kamu, dan warga lainnya tetap di sini. Duduk, minum teh, tertawa, dan bertahan. Karena mungkin itu cara kita melawan dengan menolak hilang dan menolak disapu bersih demi estetika.

ASAL BUNYI DARI MUBALIGH TANPA MIMBAR.

oleh: Akar Paragraf

25,9km jarak signifikan antara pinggirian kota besar dan kota pemilik hujan, jalan panjang ini tentu saja memiliki lika-liku diantara traffic yang disajikan. Aspal yang berlubang seperti gigi bungsu anak yang baru saja bertumbuh besar, atau lampu penerangan jalan yang gelap seperti tersasar ketika kita tergocek oleh aplikasi maps tertentu.

Fase yang terus berjalan tentu saja harus memiliki perubahan antara apa yang sedang direncanakan, namun sepertinya ini hanya berhenti di masa kampanye. Individualisme yang ditawarkan oleh Masyarakat urban tidak menjadi hal yang akrab bagi para pengembara dijalan memori kolektif. Yang kita tahu dengan seksama ialah tentang bagaimana politik dan Masyarakat urban memiliki kemesraaan yang cukup erat, musabab kota sering kali menjadi sebagai kekuatan politik, perubahan sosial, dan banyak sekali pelbagai Gerakan Masyarakat yang bermunculan. Dinamika yang disajikan pasti kompleks dan beragam macamnya.

Kota bisa dikatan dapat menjadi ruang untuk aktivisme sosial karena geografis nya dekat sekali dengan kekuasaan, namun hal ini jarang sekali dimanfaatkan oleh sebagian orang karena mungkin saja ada beberapa hal yang masih menjadi dinamika pertimbangan publik yang kita semua tahu tanah air ini dibangun dengan berbagai macam rentetan kejahatan yang dilakukan oleh para pemangku jabatan publik.

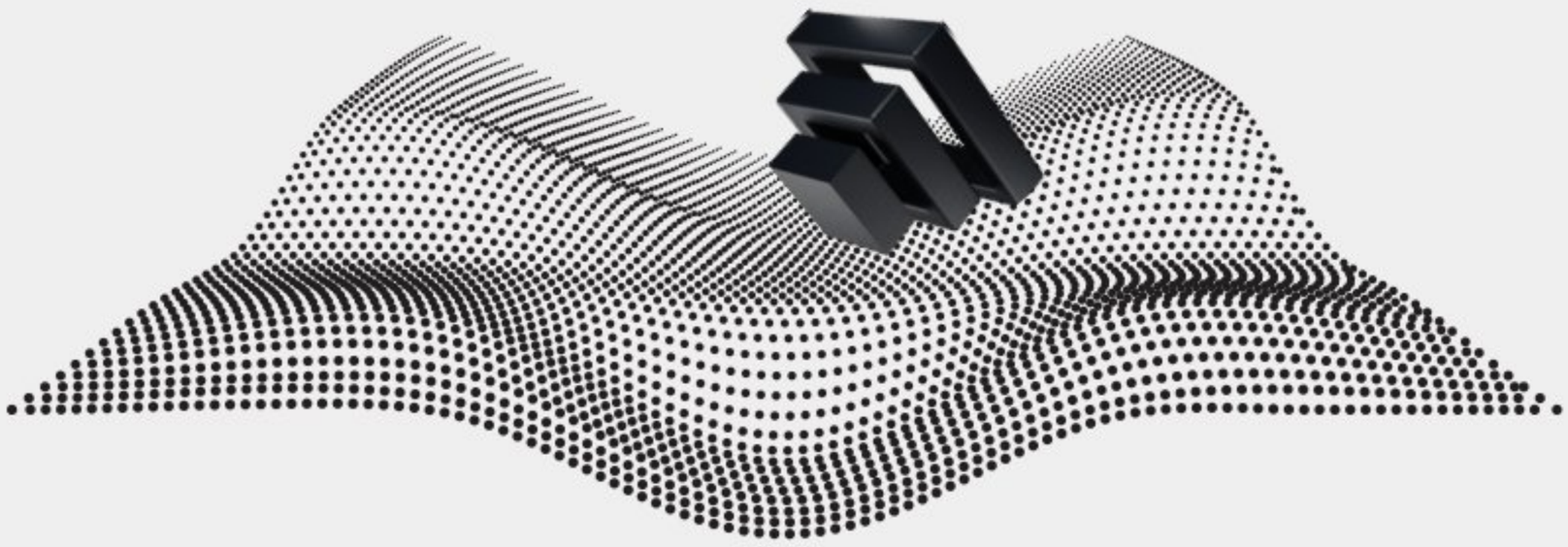

Di kota-kota besar, ketimpangan hadir ketika akses atas sumber daya tidak meluas dan merata, kesenjagan yang disajikan oleh elit terhadap Masyarakat miskin kota kian terlihat secara visual. Ketimpangan yang hadir banyak bisa dilihat dengan kacamata yang tidak ada kacanya. Bahkan, jika ada kaca hitam yang tebal pun ketimpangan itu bisa terlihat dengan jelas. Diantara yang paling terlihat adalah bagaimana pendidikan, keamanan, hak atas tempat tinggal, tidak menyentuh sampai kedapur ibu aku, dan ibu kalian.

Apakah kalian mengetahu istana bogor? Yang identik dengan hewan rusa? Kalian sepertinya mengetahui, dari sebelah timur daya diantara keamanan yang sangat ketat dan penjagaan yang sangat ekslusif. Coba kalian berjalan kaki kearah surya kencana dan terus menyusuri jalan diantara rintikan deras hujan yang disajikan kota pemilik hujan, jalan kaki saja. Fenomena yang akan disajikan sepertinya akan kompleks, atau kalian berjalan kearah utara arah pasar grosir bogor. Dan fenomena yang disajikan akan berbalik jauh dengan apa yang terjadi setelah kalian melihat kemegahan istana.

Raturan tunawisma yang tidak beralaskan mimpi dan tidak memiliki alas kaki kekuasaan, mereka hanya berjarak sekitar 10-15 menit dari dapur yang berisikan makanan khas Nusantara, dari meja yang berharga ratusan juta, dari Sepatu kulit yang dibayar oleh pajak rakyat, dari tai anjing, babi, bangsat, aku menyapaikan perkataan yang sedang marah.

Keterkaitan tulisan diatas menyatakan atas keterlibatan politik yang tidak inklusif. Hal tersebut memperparah ketimpangan sosial pada Masyarakat urban, kebijakan yang tidak partisipatif tanpa melibatkan dialog sosial membuat jurang makan dalam antara si kaya dan si miskin. Jawaban yang bisa ditawarkan adalah bagaimana kitab isa memanfaatkan aktivasi ruang publik untuk bisa menggerakan semangat kolektif adalah menjadi hal yang fundamental dapat dilakukan, sebagai jalan ikhtiar untuk bisa memekarkan bunga yang tumbuh diantara aspal-aspal perkotaan, lapangan yang menjadi gedung bertingkat, dan trotoar yang bisa dimanfaatkan.

Gunakan ruang tersebut sebagai ruang yang memiliki ruang multidimensional sebagai upaya bergeraknya kegiatan sosial, berjalannya kegiataan kebudayaan, dan mempengaruhi pergeseran ekonomi, serta menjadi ruang parade politik yang tidak hanya 5 tahun sekali. Dan aktivasi harus memiliki sikap yang inklusif, berkelanjutan, dan berkarakter sosial.

William H. Whyte – Seorang peneliti ruang public (The Social Life of Small Urban Spaces) Whyte meneliti bagaimana ruang public yang hidup membutuhkan perencanaan yang mendukung aktivias manusia. Mulai dari tempat duduk, makanan, Cahaya, hingga partisipatif Masyarakat.

Aktivasi ruang harus menjadi bersuaranya persoalan yang berangkat dari memori kolektif guna sebagai ingatan bersama yang dimiliki oleh pelbagai macam kelompok yang berangkat dari sebuah peristiwa objektif, pengalaman tertentu sebagai metode untuk Pembangunan karakter sosial yang lebih progresif.

Untuk memperdalam karakter sosial, modal memori kolektif pun rasanya tidak cukup. Konsistensi mungkin menjadi ramuan yang harus diteguk setiap bangun pagi, agar para yang mengimani nilai konsitensi bisa terus memberikan refleksi yang signifikan terhadap ruang Gerakan. Konsistensi progresif juga bisa menjadi formula yang dapat membunuh kanker pada sumber daya Gerakan, penting hal ini terus dilakukan guna dapat menghindari dogmanisasi dan stagnasi serta bisa mewujudkan integritas agar terciptanya relevansi untuk dapat membangun kepercayaan public dalam ikhtiar jangka yang cukup Panjang. Yang sudah terjadi pada hari ini tentu saja politik berpihak pada modal, bukan pada publik. Dalam konteks tersebut memori kolektif dan aktivasi ruang public menjadi modal untuk dapat mendominasi narasi tersebut. Ruang dialog, memanfaatkan teknologi melalui kanal media sosial, menjadi ruang alternatif untuk dapat memberikan suara terhadap isu yang bisa dikolaborasikan.

Ruang publik mungkin dapat diartikan sebagai arena perjuangan sosial, konsep dapat dihubungkan dengan diantaranya adalah memori kolektif, aktivasi ruang public, dan konsitensi progresif. Semuanya memiliki rekam dalam yang jelas bahwa politik kota yang sering kali berpihak pada kekuasaan dan modal, tubuh kota yand dihidupkan pasti menjadi jawaban atas cedera yang berkepanjangan. Kota sering kali menghapus jejak warga kecil untuk bisa mendapatkan fasilitas yang semestinya didapatkan. **Aktivasi ruang harus bermuatan politis dan historis**, jika tidak hanya bermuatan sebagai event dan ajang seremonial akan menjadi resiko sebagai hal komoditas yang baru, sikap lah yang perlu menjadi pertimbangan atas peranan sosial yang ditawarkan sebagai semangat kolektif. Ditengan Masyarakat urban, taman kota, trotoar jalanan, lapangan bermain, itu bukan hanya sekedar sebagai Lokasi fisik melainkan sebagai ruang dimensi sosial untuk mengulas Sejarah, untuk membicarakan kekuaasan yang ekslusif, dan sebuah identitas yang dipertaruhkan.

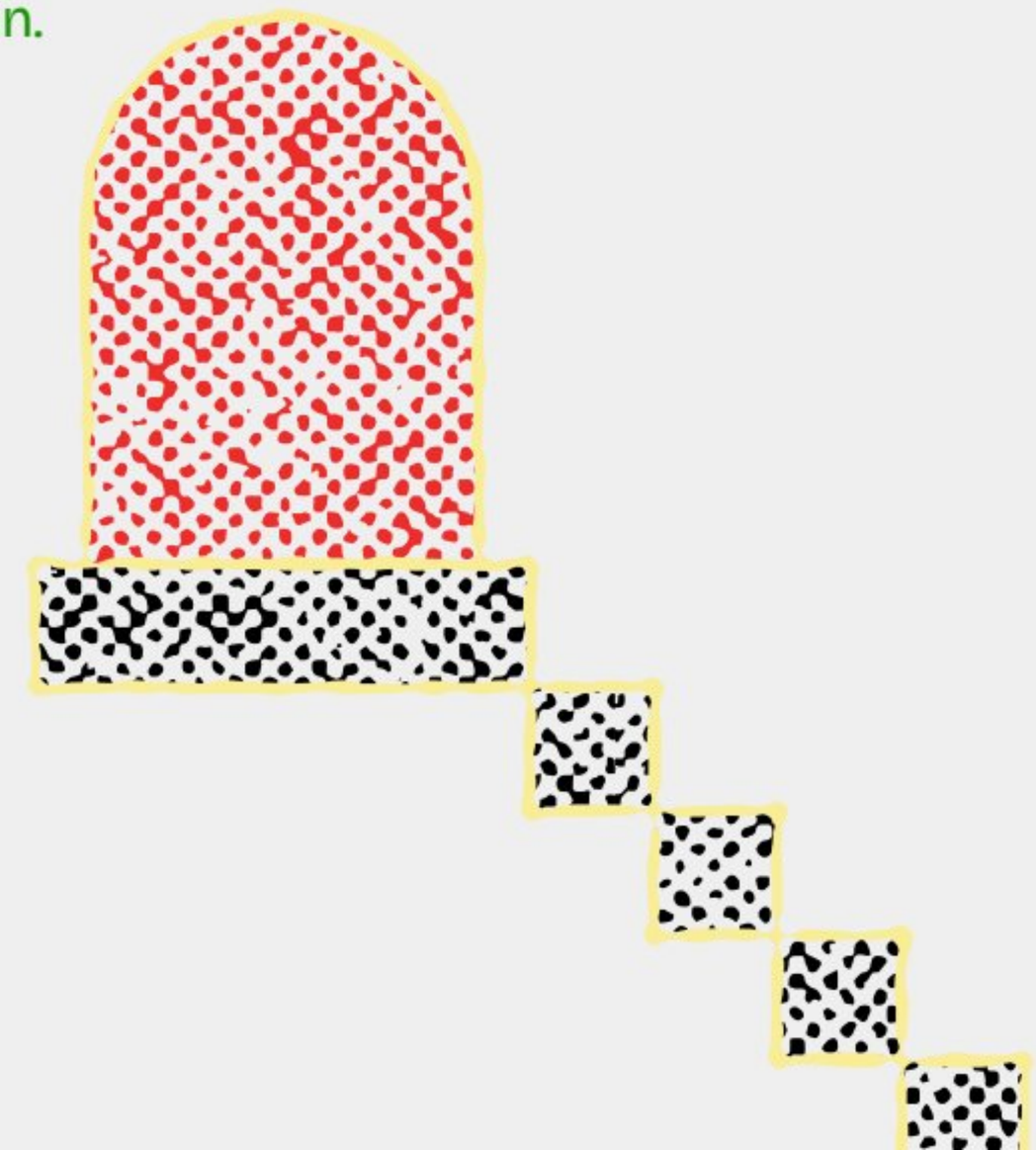

MENGEMBALIKAN KOTA PADA KITA SEBELUM BETON MENELAN SEGALANYA.

oleh: Bodhi IA

"No sun will shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play. I said darkness has covered my light. And has changed my day into night...Concrete jungle, oh why won't you let me be?... Oh man, you've got to do your best.No chains around my feet but I'm not free. I know I am bound here in captivity. And I've never known happiness. And I've never known sweet caresses. Still, I be always laughing like a clown..." — Bob Marley, Concrete Jungle

Lagu tersebut terdengar sayup-sayup tepat Ketika bara meredup di asbak kaleng. Di atas balkon penuh jemuran rumah seorang kawan di Jakarta aku melamun memandangi gedung-gedung menjulang pongah. Pendar Cahaya dari jendela apartemen menggantikan bintang yang mungkin juga muak bersinar untuk manusia. Hari ini kota sepertinya tak layak disebut sebagai tempat tinggal. Ia berubah menjadi mesin yang beringas menggilas, tanpa mata, tanpa hati orang-orang didalamnya berubah menjadi gir-gir yang menggerakan mesin raksasa. Kota menjadi ruang mekanis tempat hidup tak diberi tempat. Ketika beton menjulang bak menara babel,langit makin jauh dari perenungan manusia, serupa plafon kelabu berjamur di kamar kost murah. Pohon-pohon ditebang untuk billboard, taman-taman beralih fungsi menjadi showroom untuk berjualan apapun dengan puluhan lampu boros energi yang sangat brengsek terangnya, lapangan sepak bola digilas demi apartemen, hunian bagi mereka yang tidak pernah naik angkutan umum. Inilah “kota modern”, tempat kaum papa dan para kere dibungkam dengan desain futuristik dan diusir dengan konsep tata ruang aatas nama keindahan pembangunan.

Barangkali hak atas kota pernah bersinar sebagai utopia yang didengungkan para caleg, dan capres yang kini hanya jadi jargon seminar di hotel berbintang untuk mengetuk hati investor. Lahir dari semangat untuk menuntut hak partisipatif warga dalam membentuk kotanya, konsep ini kini dibungkam oleh mesin negara dan kepentingan korporasi. Kini kota tak pernah menjadi ruang demokrasi. Kota adalah pasar. Dan kita tak pernah dianggap sebagai warga, tapi hanya dipandang sebagai pembeli potensial yang dinilai dari rekening banknya.

Mari kita lihat apa yang terjadi di kota-kota besar Indonesia akhir-akhir ini: Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, Surabaya. Semua punya cerita serupa. Taman kota yang terbengkalai, lapangan yang digusur, gerakan komunitas yang dibubarkan. Pemerintah daerah lebih sibuk memfasilitasi pembangunan pusat perbelanjaan daripada membuat ruang terbuka untuk bermain, membaca, atau sekadar duduk tenang di bawah pohon. Seolah pemerintah ta membiarkan penduduknya menjadi manusia utuh, kita semua digiring menjadi angka-angka yang bisa di kalkulasi sebagai laba melalui lobi-lobi pengkhianat.

Di Jakarta, Taman BMW (Bersih Manusia dan Wibawa) yang dulunya digadang sebagai taman rakyat, kini menjadi bagian dari megaproyek stadion yang dikelola korporasi. Di Surabaya, beberapa ruang publik yang dihidupkan oleh komunitas pemuda dengan seni dan literasi dibubarkan karena dianggap "tidak memiliki izin resmi." Di Makassar, solo dan bandung gerakan "Perpustakaan Jalanan" yang mencoba menawarkan ruang baca alternatif di trotoar, berkali-kali diusir oleh aparat. Alasan mereka? "Menimbulkan kerumunan." Sialnya, tidak banyak dari kita yang bertanya: kenapa pemerintah takut jika orang-orang berkumpul, membaca dan mempertanyakan haknya? Barangkali Pembangunan memang dibuat oleh para pesulap, dan kita terhipnotis melihat gemerlapnya kemajuan zaman, seperti orang lengah yang larut pada tisu pesulap yang terbakar: tidur lebih lelap, lebih dalam. Kerumunan yang tercekik seperti gembala yang ta berontak digiring ke rumah jagal.

Seharusnya kerumunan menjadi tanda kehidupan dalam kota. Tapi rezim hari ini tidak menyukai kehidupan. Mereka menyukai keteraturan. Keteraturan yang steril. Kota yang rapi, kosong dari kritik, tak punya suara. Ini adalah bentuk kekuasaan orwelian, awalnya tak terlihat seperti totalitarianisme militer, tetapi lambat laun kita semakin ditampak kan wujudnya. Polisi robot yang digerekan oleh remote kontrol akhir-akhir ini tampak seperti lelucon, tapi kita tahu kemana arah kekuasaan ini: candu yang mengerikan bagi mereka yang berkuasa. Menentukan setiap senti hidup kita dengan kemajuan untuk golongannya sendiri. Kita dikontrol dalam bentuk algoritma tata ruang, pengawasan administratif, dan pasal-pasal karet yang dapat membungkam siapa pun yang tidak ikut menyembah kilauan kapital.

Big Brother is watching you. Di pemerintahan ini, bentuknya bukan mata satu di layar besar. Tapi CCTV di setiap sudut kota, bahkan di genggaman tanganmu mereka mengawasimu melalui ponsel pintar. Seakan akan mereka tak cukup menelan kota dan segala lanskap alam untuk menjadi objek permainan kekuasaan. Mereka mengawasi Gerak-gerik setiap manusia bak tuhan yang cemburu. Melalui polisi berpakaian preman mereka memotret diam-diam saat seseorang membacakan puisi. Surat edaran tentang pelarangan kegiatan tanpa izin.

Bahkan coretan dinding pun kini bisa menjadi alasan penculikan, seperti yang terjadi pada beberapa street artist di Jawa Barat dan Kalimantan yang ditangkap hanya karena menggambar wajah pinokio berpeci atau menulis kekecewaan mereka atas aturan yang sewenang-wenang. Kemarahan yang diperbolehkan hanya kemarahan aparat, sementara kemarahan kita adalah upaya makar, subversif dan membahayakan konstitusi. Atas nama undang-undang yang mereka bisa kebiri sesuka hati, mereka menentukan ruang hidupmu: tersingkir di kolong jembatan, di penjara atau rumah sakit jiwa.

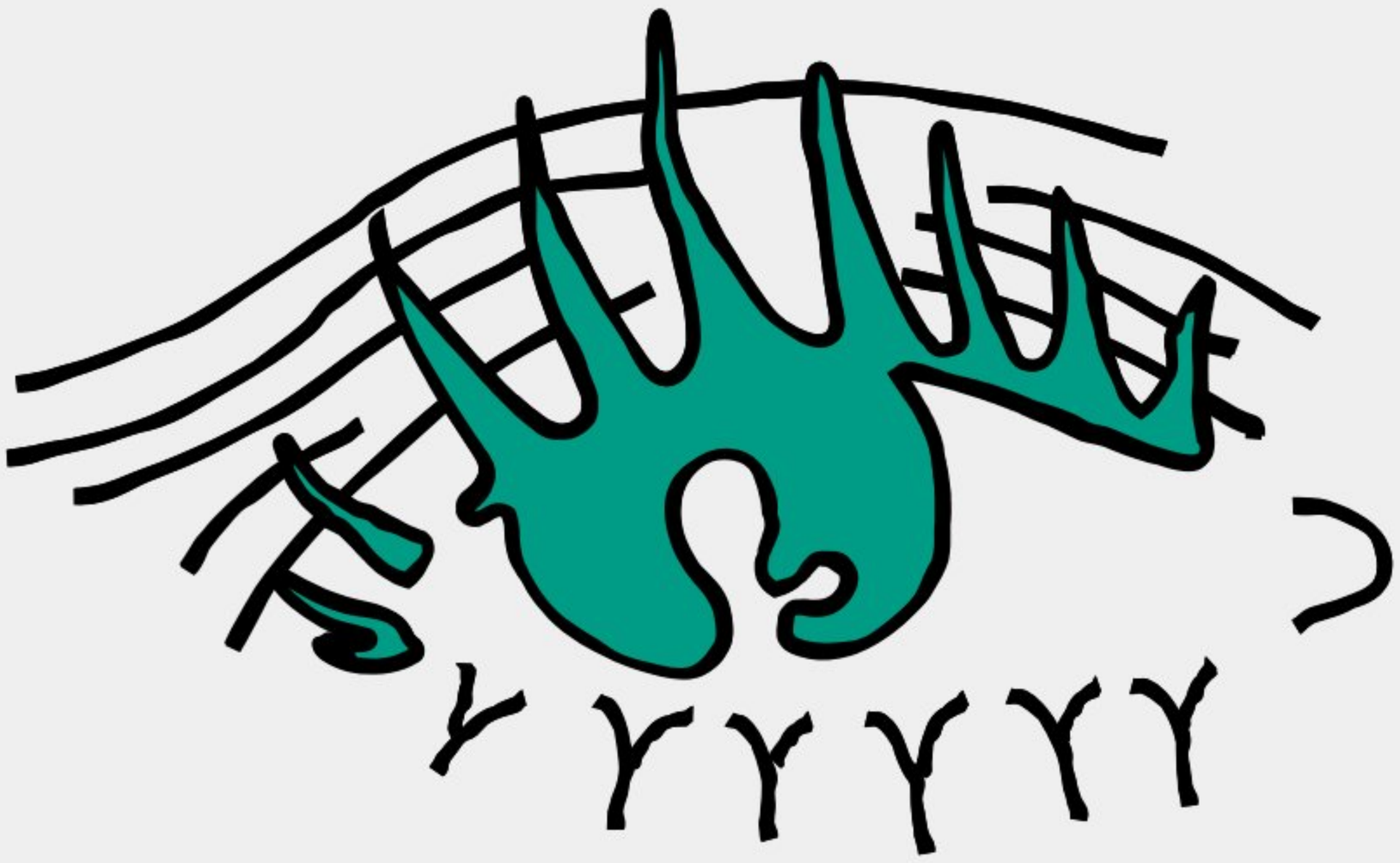

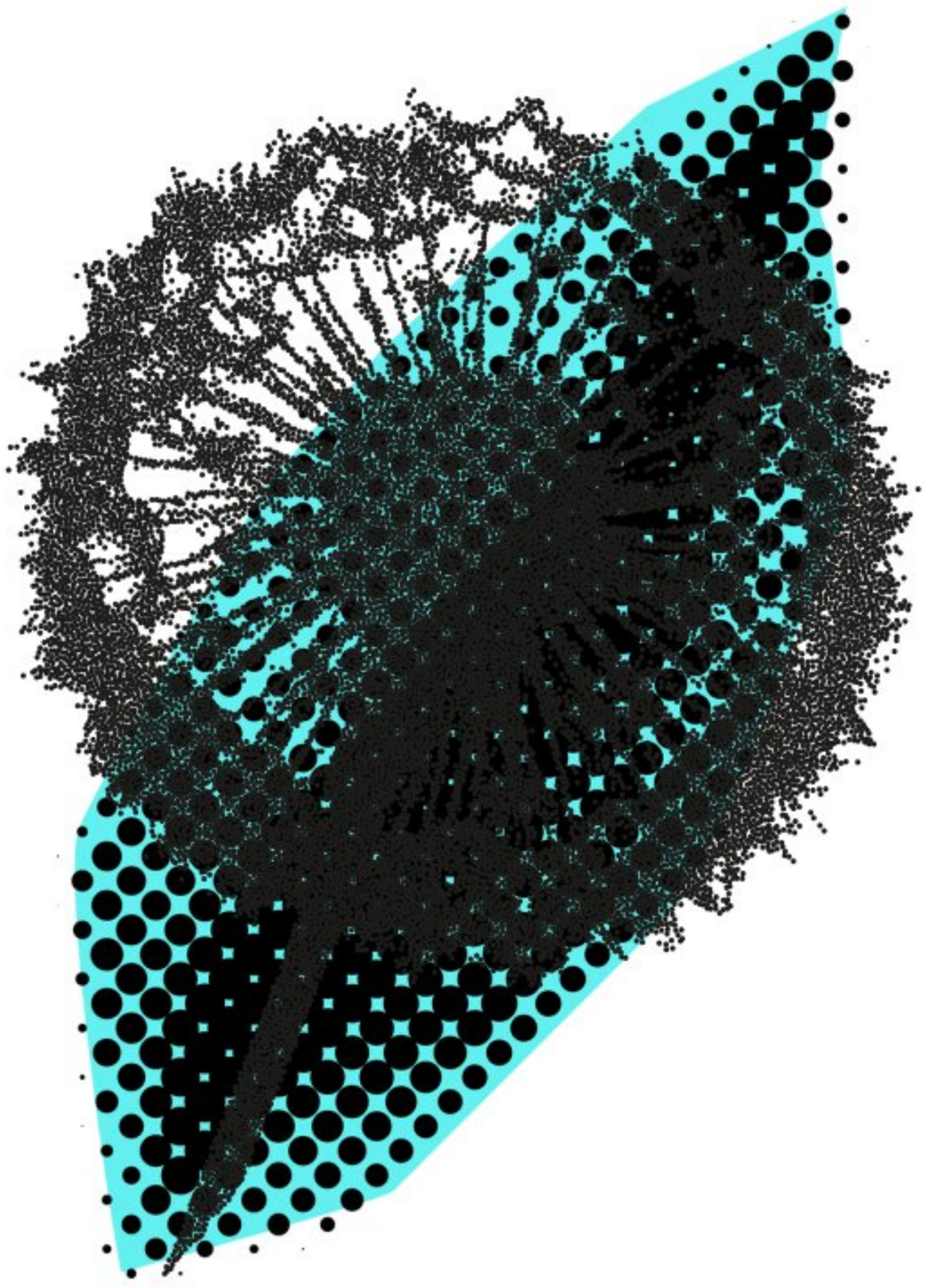

Bukankah ini bentuk paling telanjang dari kekuasaan yang paranoid? Sebuah negara yang ketakutan pada kerumunan di taman, mural, lagu dan buku adalah negara yang dijalankan oleh orang-orang picik yang takut pada kebenaran. Di kota-kota besar, banyak gerakan sipil yang mencoba merestorasi lahan kosong di tengah kota menjadi ruang hijau dan tempat diskusi. Namun tak lama tempat-tempat itu digusur dan dipasangi pagar seng. Hingga akhirnya muncul spanduk: “Akan Dibangun Ruko dan Hunian Eksklusif.” Inilah wajah pembangunan: beringas, apatis, dan penuh tipu daya.

Mereka menyebutnya investasi. Tapi bagi rakyat, itu artinya pengusiran. Penggusuran. Penyingkiran. Karena kota tidak dibangun untuk mereka yang hidup di kampung-kampung urban, di rusun-rusun reyot, atau di rumah dinding triplek. Kota dibangun untuk pemodal, turis, dan investor. Rakyat hanya dijadikan angka statistic untung rugi, jika tidak bisa dibungkam dengan segala lelucon kriminalisasi maka akan dipinggirkan, dipersulit hidupnya, bahkan di hentikan nafasnya.

Dan ironinya, kita membiarkannya. Kita duduk di rumah menonton iklan Kota Masa Depan sambil membayar pajak yang digunakan untuk membiayai alat penggusur, robot anjing futuristic, dan beragam fasilitas mewah untuk mereka yang dengan tipu daya mewakili suara kita melalui pemilu. Kita mengeluh tentang kemacetan dan pembangunan brutal tanpa menyadari bahwa satu-satunya cara membebaskan kota adalah dengan merebutnya kembali. Bukan dengan protes di media sosial semata, tapi dengan tindakan nyata. Berkumpul, Membaca. Bermain, Menulis, Menggambar, bernyanyi, dan membicarakan hal-hal yang tak beres dan perlu di protes. Menghidupkan ruang-ruang yang sekarat adalah perjuangan Panjang yang tak bisa dilakukan oleh satu individua tau satu komunitas. Ia akan niscaya jika tumbuh dari solidaritas saling bantu dan saling jaga untuk mewujudkan dunia baru yang lebih baik.

Kita lupa bahwa kota bukan milik pemerintah. Kota adalah kita. Kota adalah anak-anak yang bermain di jalanan. Kota adalah ibu-ibu yang membuka lapak sayur dan makanan tanpa harus was-was dihancurkan satpol pp. Kota adalah pemuda yang membacakan puisi di taman. Kota adalah pengamen, pesepeda, seniman mural, pembaca buku, peniup harmonika di sore hari. Ketika mereka dibungkam, maka kota menjadi kuburan yang tersusun rapi. Sebuah pemakaman kemanusiaan dengan nisan kerakusan Pembangunan.

Dalam filsafat eksistensial, ruang bukan hanya tempat. Ia adalah medium bagi keberadaan. Kita ada karena kita bergerak di ruang untuk menghidupi hidup sepenuhnya. Ketika ruang itu direbut oleh kapital dan kekuasaan, maka eksistensi kita pun dikerdilkan. Kita tak lebih dari nomer induk kependudukan yang hidup di perumahan subsidi di pinggir kota, terputus dari denyut kehidupan. Hanya penting saat pemilu dan promosi produk industry tipu-tipu.

Sudah saatnya generasi baru mengembalikan makna kota sebagai ruang yang hidup. Bukan ruang steril yang dikuasai iklan dan omong kosong penertiban. Semua ini bukan hanya soal tuntutan atas taman bermain, tapi soal hak eksistensial untuk merasa hidup merdeka. Jika taman kota telah menjadi barang mewah, maka revolusi kita adalah merebut Kembali ruang publik untuk publik. Jika membaca buku-buku adalah aktivitas yang sah untuk dibubarkan, maka pemberontakan kita adalah membaca lebih banyak dan mengadakannya di lebih banyak tempat. Menjalar seperti jamur, seperti gulma bagi kekuasaan yang berjalan seenaknya. Jika tembok dilarang dimural, maka kita harus menggambar lebih besar, lebih liar, lebih jujur. Karena kota ini bukan hanya milik mereka yang punya sertifikat hak milik. Kota ini adalah kita yang sedang berjuang untuk hidup, yang sedang mengangsur kontrakan, yang sedang membayar kost bulanan. Hak atas kota harus dimiliki oleh semua orang yang hidup didalamnya.

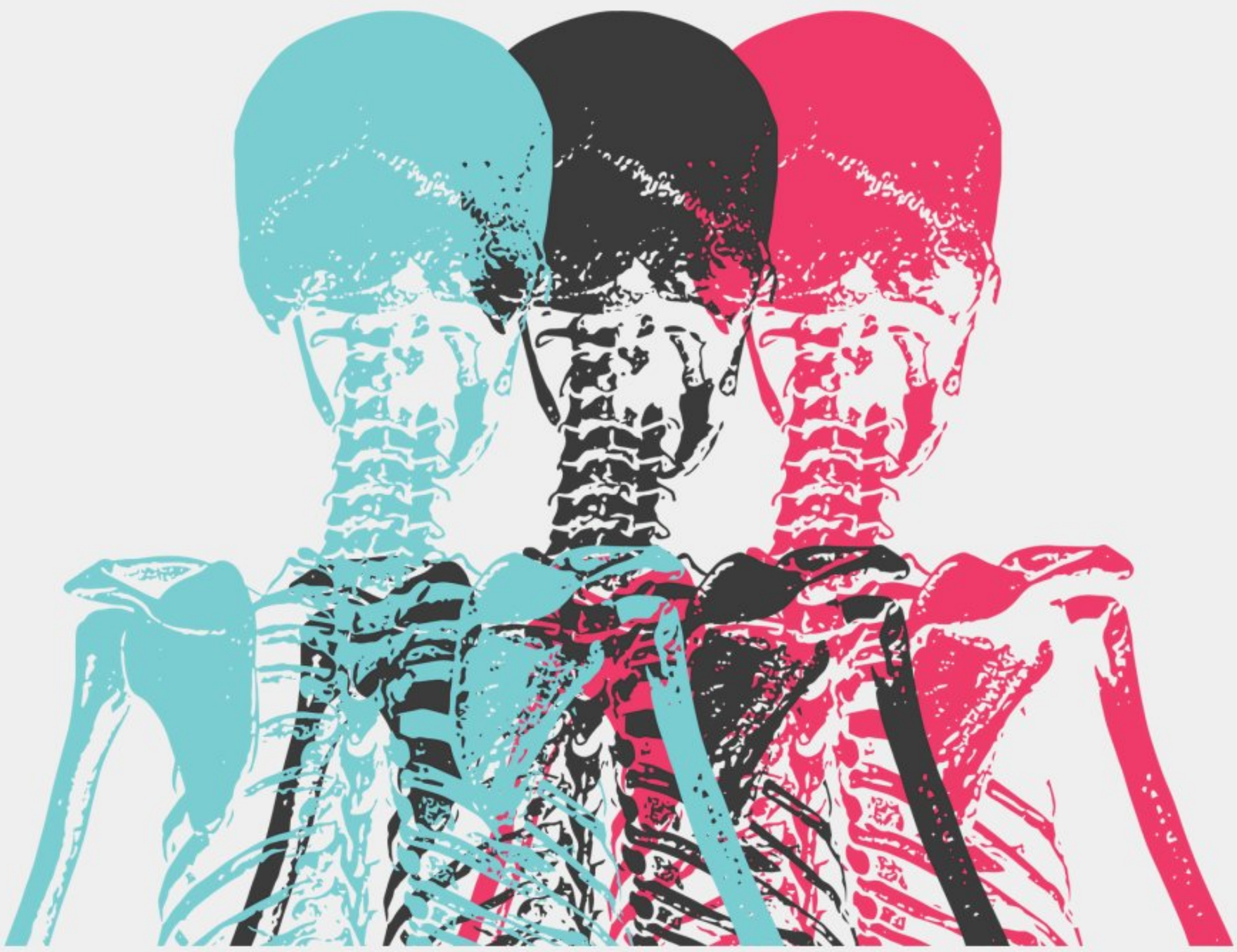

Apakah kita akan terus menjadi penonton kota kita sendiri? Apakah kita hanya akan menjadi saksi dari hancurnya ruang-ruang tumbuh, tempat bermain, tempat membaca, tempat bernafas? Sudah saatnya kita menolak menjadi perabot kota. Sudah waktunya kita merebut kembali apa yang menjadi milik bersama. Taman, trotoar, lapangan, dinding kota—semuanya adalah bagian dari tubuh kota yang harus kita hidupkan. Karena kota bukan hanya mesin pencetak laba. Kota adalah ruang tempat manusia seharusnya bisa gagal tanpa takut dimarahi, bisa membaca tanpa dibubarkan, bisa bermain tanpa harus minta izin, bisa protes tanpa harus dipenjara.

Kembali sayup-sayup marley terdengar menyanyikan reff lagu nya dari speaker Bluetooth murahan:

“Concrete jungle, what do you got for me now?
Concrete jungle, I said the city it don’t care...”

Lalu, kapan kota akan benar-benar menjadi milikmu jika kau hanya menunggu ia dikembalikan padamu sebagai puing-puing kehampaan? Rebutlah, sekarang juga.

Juli, 2025

CATATAN SAAT MINUM TEH DI TAMAN KOTA

Oleh: Maria Magdalena

Hari ini aku pulang kerja lebih awal. Badanku masih capek, kepalaku masih penuh, tapi langit sore lumayan ramah. Jadi aku mutusin buat mampir ke taman deket tempatku bekerja. Duduk sebentar, sambil iseng beli teh hangat dari abang-abang yang sepedanya diparkir di bawah pohon trembesi tua. Tehnya nikmat sekali, bukan cuma karena gulanya pas tapi karena harganya cuma lima ribu. Ngga ada branding yang gimana banget ataupun klaim-klaim organik. Hanya teh celup biasa, dalam gelas plastik murah. Tapi terasa hangat dan cukup.

Belum sempat kepala ini benar-benar tenang, tiba-tiba datang Satpol PP. Langkah mereka cepat, mukanya dingin dan malesin banget. Mereka langsung nyamperin abang penjual minuman dan mulai menertibkan. Si abang buru-buru beresin termos dan gelas-gelasnya. Kesannya jadi kayak teh itu barang ilegal, dan dia seolah ancaman negara.

Aku cuma bisa diam. Rasanya kesal. Di tengah letihku, masih harus menyaksikan ini.

Kota ini ngga nyaman. Duduk lima menit bisa jadi tindakan ilegal, tergantung kamu siapa dan kamu duduk di mana. Kita pikir kita punya hak atas kota ini. Tapi nyatanya,
kota ini bekerja persis seperti yang diinginkan kapitalisme. Memilah, memfilter, menata
ulang siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus disingkirkan pelan-pelan. Lewat cara paling halus, standar.

Standar kebersihan.
Standar ketertiban.
Standar keamanan.

Percayalah, semua kalimat itu terdengar baik sampe kamu sadar dan refleksi siapa yang sering dianggap ngga bersih, ngga tertib, dan ngga aman.

MENU TAMBAHAN MAKAN SIANG

Oleh Zera Yudhistira

Mereka sering berjalan menyusuri kota itu, menempel poster, bernyanyi, berteriak dan berdiri diam. Merenungi kota yang makin membuat risau, sehingga revolusi perlahan menjadi menu tambahan makan siang mereka. Tema-tema beterbangan dalam pesawat kertas, menjadi pengingat bagi dinding kampus, mal, tugu kota, dan berbagai sudut dunia maya.

Mereka sering berlari dan masuk ke gang-gang gelap. Suara letusan di balik telinga, tameng & pentungan, dan mimpi buruk penangkapan. Kemudian ada kepanikan di perut-perut mereka yang lapar: kawanku hilang, kawanku tidak ada kabar.

Mereka huni kota itu dengan segenap kecintaannya yang berisi kesadaran dan kebogoran. Beri mereka waktu, waktu, waktu dan mimpi indah kemenangan.

2025

PALESTINA

RESISTE